

**PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT PADA PT
ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA CABANG INDOTIM
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG**



BOSOWA

OLEH

SYAMSURIATI BONDIK

4587020207/881131023

**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
menempuh ujian Sarjana dalam Jurusan
Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1994

HALAMAN PENGESAHAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun 1994

Skripsi dengan judul : PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT
PADA PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH
JAYA CABANG INDOTIM DI KOTAMADYA
UJUNG PANDANG.

Nama : SYAMSURIATI BONDIK

No. Stambuk : 4587020 207 / 881131023

Disetujui Untuk Diajukan pada tanggal, 13 September 1994

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



(Drs. H.M. Tayeb Tamma)



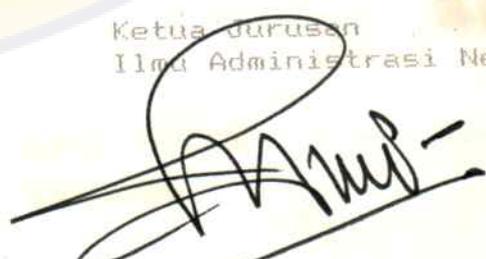
(Drs. Suparman Mekkah)

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



(Drs. Guntur Karnaeni)



(Drs. H. Mohammad Thala)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai sebagai upaya untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

Saat penulis melaksanakan pembuatan skripsi ini tdaik sedikit hambatan dan masalah yang dihadapi penulis. Namuin berkat ketekunan serta kemauan keras disertai dengan tekad yang bulat sehingga skripsi ini dapat juga diselesaikan. Hal ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa berkat adanya bantuan dari semua pihak, khususnya bapak selaku pembimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat dterwujud.

Dengan demikian penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak DR. Andi Jaya Sose, SE., MBA. selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Drs. Guntur Karneani, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang
3. Bapak Drs. H. Mohammad Thala, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

4. Bapak Drs. H.M. Tayeb Tamma dan Bapak Drs. Suparman Mekkah, sebagai pembimbing Pertama dan Kedua yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya serta mencurahkan tenaga pemikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. bapak Direktur PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar telah memberikan izin bantuan kepada penulis memberikan data selama mengadakan penelitian.
6. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen/Asisten Dsoen serta Karyawan Universitas "45" Ujung Pandang yang tidak sempat disebut satu persatu dalam skripsi ini.
7. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah berusaha dengan sekuat tenaga membiayai penulis sejak duduk dibangku Sekolah sampai pada saat ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa baik semua pihak dalam penulisan skripsi ini sehingga selesai, penulis doakan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Ujung Pandang, Agustus 1994

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
TEKS	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Beberapa Pengertian	12
1. Pengertian Pengawasan	13
2. Pengertian Pengawasan Melekat	18
B. Tujuan dan Sasaran Pengawasan Melekat	26
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Sejarah Singkat Berdirinya	32
B. Struktur Organisasi	37

	C. Dasar Hukum Tentang Pelaksanaan Asuransi	40
BAB	IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	A. Pelaksanaan Pengawasan Melekat	44
	B. Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Melekat	51
	C. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Melekat	73
BAB	V : KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA		81

BOSOWA

T E K S

Nomor :
TABEL :

Halaman

1.	TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENGARUH PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT YANG DIGUNAKAN PADA PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA CABANG MAKASSAR	50
2.	TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEJELASAN PEMBAGIAN TUGAS DARI MASING-MASING PEGAWAI PADA PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA CABANG MAKASSAR	55
3.	TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEJELASAN PERINCIAN KEBIJAKSANAAN PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA CABANG MAKASSAR	58
4.	TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KETETAPAN PELAKSANAAN TUAGS DENGAN RENCANA KERJA YANGDIRENCAAKAN PADA PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA CABANG MAKASSAR	61
5.	TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEJELASAN PROSEDUR KERJA PADA PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA CABANG MAKASSAR	64
6.	TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KELANCARAN PENCATATAN HASIL KERJA DAN PELAPORAM PADA PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA CABANG MAKASSAR	67
7.	TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KELANCARAN PEMBINAAN PERSONIL PEGAWAI PADA PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA CABANG MAKASSAR	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu, menjadi lebih konkrit sejak awal pemerintahan Orde Baru, yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Adapun tekad itu dimanifestasikan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan intesif dan terterah dirancang menjadi pola Pembangunan Jangka Panjang selama 25 tahun tahap pertama. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu khususnya dalam Ketetapan MPR-RI No.II/MPR/1978, dinyatakan dengan tegas bahwa : "Berdasarkan Pokok pikiran hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (1989:18)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengawasan melekat harus dimasukkan secara langsung dan praktis didalam manajemen pemerintahan. Dengan demikian diharapkan setiap pimpinan satuan kerja langsung dapat mengetahui kegiatan nyata dari setiap aspek dan

permasalahan pelaksanaan tugas dalam lingkungan satuan organisasi masing-masing.

Untuk pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan satu kerja harus dilaksanakan secara berjenjang ke bawah. Dengan kata lain, pengawasan melekat harus dioperasikan atau dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya agar upaya itu terwujud dalam melaksanakan pengawasan melekat para pimpinan/atasan langsung harus mempunyai:

- a. Kemauan tekad dan keberanian untuk melakukan pengawasan dan melaksanakan tindak lanjutnya.
- b. Kesungguhan dan kecemasan melakukan secara nyata kegiatan pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Kemampuan untuk melaksanakan pengawasan, baik kemampuan manajerial maupun penguasaan teknik tentang kegiatan yang dilaksanakan bawahan.

Untuk dapat melaksanakan pengawasan melekat secara efektif dan efisien setiap pimpinan perlu mengetahui sarana dan sistem pengawasan yang diperlukan. Di samping itu setiap pimpinan wajib pula untuk membudayakan pengawasan melekat agar tujuan dapat dijadikan sebagai unsur pokok dan pengawasan fungsional sebagai penunjang dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan beribawah dapat dicapai secara maksimal.

Oleh karena itu organisasi harus disusun sedemikian rupa agar mampu mewartahi dan mengoprasikan volume dan beban kerja sebagai tugas pokok secara layak. Kemudian perlu diperoleh dan ditempatkan sejumlah personil yang memenuhi syarat untuk setiap bidang/unit kerja sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab yang harus di embannya. Dalam pengorganisasian yang perlu diperhatikan dan diterapkan beberapa prinsip, diantaranya adalah :

- a. Pembidangan kerja yang diwujudkan sebagai unit kerja untuk menampung sejumlah pekerjaan sejenis.
- b. Berdasarkan pembagian menjadi unit kerja itu, selanjutnya tanggung jawab harus dibagi-bagi, sehingga tidak terjadi hanya satu orang saja yang mengendalikan semua kegiatan dan semua tahap dari setiap transaksi di lingkungannya.
- c. Setiap petugas pelaksana harus mengetahui secara jelas wewenang dalam mengambil keputusan atau tindakan, agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara wajar/layak.
- d. Setiap tugas dan tanggung jawab harus diuraikan dan didefenisikan secara jelas agar tidak terjadi penyalagunaan dan penyelwenangan wewenang.
- e. Pimpinan/atasan yang mendapatkan pembagian tugas dan melimpahkan wewenang harus mempunyai metode

untuk memantau, memeriksa dan menilai pelaksanaannya oleh pimpinan bawahannya atau oleh para pelaksana pekerjaan secara operasional.

- f. Pelimpahan wewenang harus diiringi dengan pelimpahan tanggung jawab.
- g. Penyampaian tanggung jawab kepada atasan harus mencakup cara pelaksanaannya dan hasil-hasil yang dicapai.
- h. Setiap pegawai didalam unit kerja wajib memahami semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokoknya.
- i. Organisasi harus cukup fleksibel untuk memungkinkan sinkronisasi dan perubahan struktur yang diperlukan.
- j. Didalam penyusunan struktur organisasi dan pembagian tugas/wewenang dan tanggung jawab harus dihindari terjadinya duplikasi, tumpang tindih dan pertikaian dalam pelaksanaannya.
- k. Unit organisasi harus didesain (dirancang) secara ekonomis untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas maksimal dengan penggunaan biaya yang minimal.

Oleh sebab itu langkah-langka permulaan dari kegiatan pembinaan personil ini yang penting diantaranya untuk dilaksanakan adalah usaha memberikan tugas dan kewajiban para pegawai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu di dalam pembinaan personil perekrutan calon pegawai pertama



kali merupakan hal yang sangat penting. Untuk keperluan itu sekurang-kurangnya perlu di lakukan langkah-langka sebagai berikut:

- a. Menetapkan pernyataan pekerjaan yang akan dijadikan kriteria dalam menerima pegawai. Bilamana mungkin di susun berupa uraian terperinci tentang setiap pekerjaan dilengkapi dengan persyaratan tentang personil yang dapat diterima untuk melaksanakannya.
- b. Menyelesaikan personil dari dalam atau dari luar organisasi/unit kerja memerlukannya untuk mendapatkan yang kualifikasinya sesuai tuntutan pekerjaan yang akan diembannya.

Pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pemantauan pemeriksaan, dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran. Proses itu secara keseluruhan berlangsung sebagai suatu sistem yang didalamnya terdapat beberapa unsur atau elemen yang saling berkaitan atau saling berinteraksi sebagai suatu kesatuan. Sehubungan dengan itu yang dimaksud dengan sistem pengawasan adalah keseluruhan proses, Pemeriksaan dan evaluasi terhadap sasaran tertentu yang saling berinteraksi satu dengan yang rapat unsur yang saling berinteraksi satu dengan yang lain.

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik memilih judul: Pelaksanaan pengawasan melekat

pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya". Adapun alasan-alasan yang merupakan pertimbangan pemilihan judul tersebut antara lain:

1. Cara kerja aparaturnya pemerintah dibidang pekerjaannya ternyata masih ditemui berbagai penyalahgunaan wewenang, oleh karena itulah maka melalui GBHN para wakil rakyat mengamankan agar diupayakan peningkatan keterpaduan dalam melaksanakan pengawasan.
2. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung dapat dilakukan tanpa menggunakan dana, sehingga berarti fungsi pengawasan akan mampu menjangkau semua unit kerja.
3. Asuransi merupakan alat yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang kompleks, suksesnya asuransi membutuhkan usaha pendistribusian biaya dan manfaat yang seadil mungkin diantar peserta.
4. Bahwa peranan perusahaan asuransi jiwa itu sangat besar karena dapat menghasilkan dana yang besar dan sekaligus merupakan manifestasi daripada gotong royong dalam menunjukkan tujuan hidup yang jelas, yakni bernilai bagi kemuliaan Tuhan dan bagi semua manusia, dalam arti kata bahwa hidup ini harus mempunyai tujuan.

nampak yang dimaksud, dan seterusnya disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

- b. Diharapkan dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan melekat yang mana dapat dikaitkan dengan teori.
- c. Diharapkan juga dapat menjadi bahan informasi bagi mereka yang melakukannya.

D. Metode Penelitian

1. Tipe dan Dasar Penelitian

a. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yaitu bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah data suatu objek yang diteliti.

b. Tipe Penelitian

Di dalam mengadakan penelitian ini digunakan tipe penelitian deskripsif yaitu memberikan gambaran atau uraian untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan analisa terhadap objek-objek yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

- a. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui literatur-literatur, membaca buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen lainya yang ada kaitannya

dengan masalah yang akan diteliti.

b. Penelitian Lapangan (Field Reserch)

yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian/yang diteliti, dalam hal ini pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Makassar di Kotamadya Ujung Pndang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung mengadakan tanya jawab pegawai/karyawan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar Kotamadya Ujung Pandang.

b. Observai (Pengamatan) yaitu dilakukan secara langsung mengadakan terhadap objek yang akan diteliti, melihat cara pelaksanaan pengawasan melekat yang dilaksanakan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Indonesia Timur di Kotamadya Ujung Pandng.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi penelitian ini ialah keseluruhan pegawai/karywan pada PT. Asurnsi Biumi Asih Jaya Cabang Indonesia Timur di Kotamadya Ujung Pandang berjumlah 78 oran.

b. Sampel

Pemilihan sampel sebagai responden dilakukan berdasarkan purposive sampling yang ditetapkan sebagai berikut:

- Kepala Pimpinan Cabang	1 orang
- Wakil Pimpinan Cabang	1 orang
- Kepala Tata Usaha Cabang	1 orang
- Kepala Pemasaran Distrik	10 orang
- Kabag Diklat	1 orang
- Instruktur	4 orang
- K a s i r	10 orang
- K T U D	10 orang
<hr/>	
J u m l a h	38 orang

5. Analisa Data

Data analisa dengan cara mentabulasi jawaban responden yang dikumpulkan, dan menghitung frekuensi serta menghitung prosentasenya dari angka-angka yang diperoleh, selanjutnya diadakan inteprensi terhadap informasi yang diberikan oleh responden.

E. Sistematika Pembahasan

Dari hasil analisa sehubungan dengan metode peneliltian di atas, maka pembahasan skripsi ini akan disusun dalam Lima Bab dengan sistematika sebagai

berikut :

Bab Pertama yaitu Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan Beberapa Pengertian, Tujuan dan Sasaran Pengawasan Melekat.

Bab Ketiga yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang memuat Sejarah Singkat Berdirinya, Struktur Organisasi, Dasar Hukum Tentang Pelaksanaan Asuransi.

Bab Keempat yaitu Hasil Penelitian Pembahasan yang membahas tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Melekat, Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Pengawasan Melekat.

Bab Kelima yaitu merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

Pengertian pokok yang dimaksud oleh penulis adalah agar pembaca dapat mengerti segala apa yang dituangkan oleh penulis dalam skripsi ini. Adapun hal-hal pokok yang merupakan konsep dasar dan yang perlu diberikan pengertian adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Pengawasan

Telah diketahui bahwa salah satu sasaran pokok daripada administrasi dan manajemen didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang efisien dan efektif semaksimal mungkin. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka sudah barang tentu terdapat banyak cara yang dapat ditempuh guna meningkatkan efisiensi kerja sebagaimana yang dikehendaki dan diharapkan sebelumnya.

H. Koontz dan O'Donnel, di dalam bukunya yang berjudul "Principles Of Management" yang mana mengemukakan bahwa pengertian manajemen seperti yang telah dikutip bahwa :

"Manajemen adalah hubungan dengan suatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang lain." (1988:42).

Berdasarkan rumusan atau pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah merupakan suatu kegiatan untuk dapat memanfaatkan orang lain dalam pencapaian tujuan dari organisasi yang bersangkutan.

Selanjutnya oleh Sarwoto mengembangkan pengertian manajemen tersebut sebagai berikut:

"Manajemen adalah merupakan proses pemimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisasi secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan atau yang diharapkan." (1981:16)

Sesuai dengan penjelasan pengertian manajemen tersebut, maka dalam pelaksanaan tugasnya manajemen mempunyai fungsi-fungsi antara lain :

- a. Fungsi perencanaan (planning)
- b. Fungsi pengorganisasian (organizing)
- c. Fungsi pemberian Motivasi (motivating)
- d. Fungsi Pengawasan (Controlling)
- e. Fungsi penilaian (Evaluating).

Dengan demikian maka jelaslah bahwa salah satu fungsi yang mutlak dijalankan oleh pihak lain/manajemen dan hendaknya dilakukan secara terus menerus sehingga pekerjaan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan memperoleh hasil yang lebih baik dan memuaskan.

Untuk mencapai tujuan daripada pelaksanaan kegiatan administrasi dan manajemen tersebut di

atas, maka dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu guna pencapaian hasil yang lebih efisien dan efektif, maka perlu untuk diperhatikan fungsi organik dari administrasi dan manajemen yang diantaranya adalah fungsi pengawasan, karena tanpa adanya fungsi pengawasan ini kemungkinan tidak dapat diketahui dengan jelas dan pasti apakah sebenarnya tujuan yang dikehendaki itu maka juga apakah secara efisiensi dan efektif dan jauh dari sasaran yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian tersebut, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli dan ilmuwan mengenai pengertian pengawasan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sujanto bahwa:

"Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan, untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak."
(1983:28).

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa pengawasan itu merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk dapat mengavaluasi, mengetahui serta menilai kenyataan yang sebenarnya yaitu apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan itu dimaksudkan untuk dapat mencegah atau untuk dapat mengambil langkah



memperbaiki kesalahan, penyimpangan ketidaksesuaian, dengan rencana yang telah ditentukan.

Jadi pada prinsipnya bahwa maksud dari pengawasan adalah bukan untuk mencari kesalahan terhadap hasil pekerjaan, namun hal ini sejalan dengan tujuan pengawasan yaitu agar hasil pelaksanaan pekerjaan dapat diperoleh, secara berdaya guna dan berhasil guna.

Istilah pengawasan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "Control" yang merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Soewrno Handayanigrat bahwa :

"Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pihak bawahannya adalah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan." (1988:79).

Dari pengertian tersebut dapat memberikan gambaran seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan dari organisasi yang bersangkutan dapat sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Sondang O. Siagian sebagai berikut:

"Pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan dari organisasi untuk dapat menjamin agar supaya

tindakan yang dapat memungkinkan dan menghemat dapat segera di atasi.

Pengertian pengawasan juga telah dikemukakan oleh Sarwoto bahwa :

"Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahan agar pekerja-pekerja terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan hasilnya." (1981:93)

Dari pengertian tersebut dapat disimpang bahwa yang menanggung unsur mengarahkan dan mengendalikan proses pengamatan dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana.

Perlu juga diketahui bahwa kekhususan pengawasan dibidang pembangunan itu hanyalah terletak pada objeknya. Karena obyek inilah yang menentukan standar atau tolok ukur yang dipergunakan dalam setiap pencapaian tujuan. Pada dasarnya suatu sistem pengawasan intern yang baik tidak hanya terlepas dan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan bagian yang khusus akuntansi dan keuangan saja tetapi lebih luas daripada itu. Pengawasan intern yang baik hanya terbatas pada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah tertentu saja, melainkan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu perusahaan mengenai pembukuan, keuangan dan operasi lainnya

konsetruktif kepada pimpinan perusahaan. Menurut Ir. Sujamto dala bukunya yang berjudul Norma dan Etika Pengawasan merumuskan bahwa :

"Norma pengawasan adalah patokan kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang dikehendaki." (1989:18).

Dalam penertian norma pengawasan tersebut diatur dalam Instruksi Persiden No. 15 tahun 1983.

2. Pengertian Pengawasan Melekat

Berikut ini diberikan pengertian yang mendasar mengenai pengawasan melekat pada dilakukan oleh setiap pejabat atau pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya masing-masing dengan membandingkan dengan apa yang akan dilaksanakannya dan dengan apa yang sedang dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakannya.

Pengawasan melekat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Hadari Nawawi sebagai berikut :

"1. Pengawasan melekat adalah merupakan proses pemantauan, pemeriksa dan evaluasi yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna oleh pimpinan unit atau organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaiin tujuan yang telah dirumuskannya.

2. Pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang

dilakukan berdaya guna dan berhasil guna oleh pimpinan unit atau organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk dapat mengathui akan kelemahan-kelemahannya atau kekurangan-kekurangannya, agar dapat diprbaiki oleh pimpinan yang berwewenang pada jenjang yang lebih tinggi, demi tercapainya berbagai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya." (1989:36-38).

Bardasakan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pengawasan melekat adalah dimaksudkan untuk mewajibkan agar setiap atasan atau pejabat pimpinan langsung dapt mengetahui kegiatannya setiap aspek dan permasalahan pelaksanaan tugas dalam lingkungan organisasi masing-masing untuk selanjutnya bilamana terjadi penyimpangan, ia dapat langsung segerah mengambil langkah-langkah perbaikan dan tindakan seperlunya, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah pengawasan melekat, pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional sebenarnya telah lama dikenal dan pengawasan dan dipergunakan tetapi baru setelah diperlukannya Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983, tentang pedoman pelaksanaan pengawasan barulah pengertiannya manjadi semakin mantap, karena di dalam Inpres tersebut istilah ini dicantumkan dan diatur secar resmi meskipun tidak diberikan batasan atau pengertian otentik mengenai pengawasan-pengawasan tesebut.

Untuk lebih jelasnya, maka kita dapat melihat Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983, yang mana ditegaskan bahwa pengawasan yaitu :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung baik di tingkatan Pusat maupun di tingkat daerah.
2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

Kedua jenis pengawasan tersebut dapat diatur lebih lanjut dalam Inpres tersebut yang antara lain pada pengawasan.

Kedua jenis pengawasan tersebut dapat diatur lebih lanjut dalam Inpres tersebut yang antara lain pada pasal 3 dengan ayat selengkapnya adalah sebagai berikut :

- (1) Pimpinan semua satuan organisasi pemerintah, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing-masing.
- (2) Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - a. Melakukan melalui pengertian struktur organisasi yang di jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula.

- b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan.
 - c. Melalui rencana yang menggambarkan kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya.
 - d. Melalui pencetakan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban baik mengenai pelaksanaan tugas maupun pengelolaan keuangan.
 - e. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.
 - f. Melalui pembinaan pronsil yang terus menerus sehingga pada pelaksanaan menjadi unsur yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.
- (3) Adanya aparat pengawasan fungsional dalam suatu organisasi pemerintahan tidak dapat mengurangi pelaksanaan dan pengawasan melekat

yang harus dilakukan oleh atasan kepada bawahan.

Bertitik tolak dari uraian yang terdapat dalam intruksi Peresiden No. 15 tahun 1983 tersebut, dalam dapat dituangkan dalam bentuk rumus, yaitu :

- | | |
|----------|----------------------------------|
| " Warkat | = PAL + SPM |
| - WASKAT | = Pengawasan Melekat |
| - PAL | = Pengawasan tak langsung |
| - SPM | = Sistem pengendalian Manajemen" |

Dengan kata lain WASKAT adalah pengawasan yang mencakup tugas atasalangsung dengan didasarkan pada sistem pengendalian manajemen yang ada.

Pengawasan atasan langsung merupakan pengamatan setiap saat yang dilakukan oleh setiap setiap atasan langsung merupakan pengamatan setiap atasan terhadap pelaksanaan tugas/fungsi bawahan, disertai adanya petunjuk atau tidak korektif bilamana perlu. Dalam hal ini pengawasan atasan langsung dinilai sangat efektif, karena jarak antara subjek (pimpinan) dan objek (bawahan) pengawasan adalah paling dekat, sehingga dapat dilaksanakan paling intensif.

Berdasarkan pengertian pengawasan langsung seperti yang dimaksud dalam Inpres No. 15 tahun 1983, maka pengawasan melekat mempunyai kaitan yang

sangat erat hubungannya dengan pengawasan atasan langsung selalu berorientasi pada struktur organisasi, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja, serta pembinaan personil, yang kesemuanya itu merupakan tugas dari atasan langsung, tetapi juga merupakan unsur-unsur pokok yang sekaligus merupakan sarana pengawasan melekat.

Dengan berpegang pada uraian tersebut di atas maka penulis mencoba untuk menyajikan pengertian pengawasan melekat sebagai berikut:

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang berupa perencanaan, perancangan, pengamatan pengecekan, pemeriksa, penilaian, penelusuran, pengujian penelitian, pelacakan. Perbandingan kegiatan ataupun istilah yang bersifat pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut secara berdaya guna, dan berhasil guna atau secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pengawasan atasan langsung yang dilakukan melalui fungsi pengawasan melekat merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting disampaikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan melekat



sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam memimpin sesuatu organisasi atau unit kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka oleh Prof. Dr. H. Hadari Nawawi memberikan pengertian atau defenisi operasional mengenai pengawasan melekat sebagai berikut:

"Pengawasan melekat adalah proses pemantuan pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung terhadap pekerjaan dan hasil kerja dari bawahannya, agar dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dari pada ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam perkataan terhadap pekerjaan termasuk juga menyangkut prosesnya, yang menyentuh tidak sekedar berkenaan dengan aspek disiplin ketentuan, dedikasi, loyalitas, inisiatif dan kreatifitas dalam pekerjaan" (1989:102).

Pengertian tersebut di atas mengandung makna bahwa dalam melaksanakan pengawasan melekat, bilamana atasan langsung menemukan hambatan bekerja yang bersumber dari kondisi diluar kewenangannya, hendaknya para bawahan segera mengajukan usul atau saran perbaikan pada atasan yang berwenang agar mendapat perhatian untuk memperbaiki, dengan cara terwujudnya efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada semua jenjang organisasi/unit kerja dilingkungan aparatur pemerintah.

Seorang pimpinan memiliki wewenang tertentu sehingga berhak untuk mengambil keputusan atau

merupakan pengawasan melekat.

Pengawasan melekat yang dimaksud adalah agar tujuan dan sasaran kegiatan usaha unit-unit pemerintahan dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasil guna dimana dilaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya, fungsi rencana yang berlaku. Di dalam Instruksi Presiden Ri No. 15 Tahun 1983 disebutkan bahwa :

"Pengawasan melekat bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan."
(1986:15).

Telah digariskan bahwa pada ketentuan tersebut dimana setiap atasan langsung atau pejabat pimpinan lainnya langsung mengetahui kegiatannya dari setiap aspek serta permasalahan pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pimpinan terhadap atau langsung dapat bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan atau kegiatan tersebut, sehingga pihak pimpinan dapat mendeteksi sedini mungkin penyimpangan yang terjadi serta dapat berupaya guna mengambil langkah-langka perbaikan seperlunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan sesuai itu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari pengawasan melekat itu sendiri adalah guna dapat mendukung kelancaran dan

ketetapan tugas umum pemerintahan dan dapat dilaksanakan secara tertib berdasarkan atas sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna dan hasil guna ini yang sebaik-sebaiknya.

Dalam Inpres No. 1 tahun 1989 juga disebutkan tujuan dari pengawasan melekat adalah sebagai berikut:

"Tujuan pengawasan melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh atasan langsung." (1989:135)

Dari pengertian tersebut, maka sasaran konkritnya dari pelaksanaan pengawasan melekat adalah upaya yang terarah pada penerbitan dan proses pembinaan terhadap aparatur pemerintahan, sehingga lebih bersifat preventif dan dengan cara yang biasa menanggulangi berbagai penyimpangan dan penyelewengan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya, juga di samping itu meningkatkan disiplin dan prestasi kerja pegawai/karyawan.

Tujuan pengawasan melekat tidak hanya berakhir pada di perolehnya temuan-temuan oleh atasan

langsung dari hasil pengamatan, pemeriksaan, Temuan-temuan tersebut hanya akan bermanfaat atau mempunyai makna bagi tujuan pengawasan melekat bilamana diiringi dengan tindakan lanjut oleh atasan yang mengemban fungsi pengawasan melekat. Tindak lanjut tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Tindak lanjut yang bersifat preventif

Tindak lanjut yang bersifat preventif adalah merupakan suatu upaya pencegahan terjadinya penyalagunaan, wewenang dan penyelewengan lainnya dengan melakukan penyempurnaan unsur aparatur di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan sepenuhnya. Disamping itu tindakan preventif dilakukan juga dengan upaya mencegah terjadinya pemborosan kebocoran, kebocoran dan penyimpangan oleh bawahan yang mendapat kepercayaan guna memperoleh kekayaan dan keuangan negara.

2. Tindak lanjut yang bersifat represif

Tindak lanjut ini dilakukan yaitu berupa peningkatan penindakan terhadap perbuatan korupsi, penyalagunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya. Tindakan

penyelesaian ini dilakukan sesuai dengan batasan wewenang yang dilimpahkan pada pejabat atau kepada pegawai yang memiliki legitimasi sebagai atasan.

Untuk dapat meningkatkan pengawasan yang dimaksud, yang dilakukan oleh pimpinan organisasi atau unit kerja terhadap bawahannya, maka dilaksanakan melalui pengawasan melekat.

Tujuan pengawasan pada dasarnya bermuara pada tujuan strategi sebagaimana yang disebutkan oleh S.P. Siagian dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Suatu Pengantar" dijelaskan bahwa pengawasan melekat bertujuan :

- "Tujuan dari pada pengawasan melekat adalah
1. Menumbuhkan kesadaran dan budaya pengawasan melekat pada khususnya, fungsi pengawasan pada umumnya, sehingga pengawasan dapat berjalan secara wajar, efisien dan efektif pada pejabat di lingkungan instansi masing-masing.
 2. Meningkatkan pendayagunaan pelaksanaan pengawasan melekat pendayagunaan aparatur pemerintah dalam lingkungan instansi masing-masing.
 3. Meningkatkan disiplin bagi aparatur pemerintah menuju terwujudnya disiplin nasional." (1983:111)

Dari pengertian tersebut di atas, maka secara global telah memberikan penekanan tentang pentingnya pengawasan melekat itu dibudayakan dalam kaitannya dengan upaya pembinaan aparatur

negara. Hal ini diilhami oleh suatu latar belakang pemikiran untuk menjadi setiap tugas, tindakan dan wewenang dapat dilaksanakan dan dijalankan secara efektif dilingkungan masing-masing.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya

Pada dasarnya Asuransi bukanlah ciptaan seseorang beberapa orang, akan tetapi Asuransi timbul karena akibat kebutuhan dan usaha manusia untuk mengurangi resiko atas usaha untuk memperkecil resiko yang akan timbul selama hidupnya. Dan lebih mendorong gagasan dalam hidupnya itu ialah yakni bernilai bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama manusia.

Salah seorang yang pertama mempunyai gagasan ini ialah K.M. Sinaga, yang mengatakan hidup ini harus mempunyai tujuan dimana gagasan itu, mendirikan sebuah perusahaan Asuransi jiwa itu pada tahun 1957, ketika ia bekerja di AJB Putra 1912 mulai dari Tahun 1951 hingga tahun 1955. Salah satu kesan dari apa yang dilihat di alami dan dipelajari di Negara Kanguru itu ialah bawah peranan perusahaan Asuransi jiwa itu sangat besar karena dapat menghasilkan dana yang besar dan sekaligus merupakan manifestasi daripada gotong royong atau kerjasama. Setelah K.M. Sinaga kembali ke tanah air, ditengah kesibukan tugas yang penuh dengan berbagai macam permasalahan ia merasa bahwa gagasannya itu perlu dikembang terus. Oleh karena prestasinya

baik, ia di pandang sebagai tenaga potensial yang dapat menunjang kemajuan perusahaan. Ia mendapat predikat "Bintang Dinas Luar" di AJB Putra 1912. Segala sesuatu di dunia ini memang punya awal dan akhir. Awal yang baik tidak selalu berakhir dengan baik atau serba indah. Demikianlah kenyataan dalam pengalaman K.M. Sinaga ia tidak dapat selamanya mengabdikan kepada AJB Putra, K.M. Sinaga ini bekerja sebagai guru Jemaat di Gereja HKBP di Jakarta. Pekerjaan ini tidak menyita banyak waktu, oleh karena itu ia memberikan perhatiannya pada pada orang-orang gelandangan itu yang tuna wisma yang tinggal dikali malang, dan mereka yang pada malam hari tidurnya di taman Surpati. Bersama sama dengan Achmadi dan Pendeta Loe Siaw Tjong, ia mendirikan Lembaga Pembinaan Sosial (LPS). Berdirinya LPS ini, yang semata-mata ingin membantu para gelandangan yang tunawisma dan karya, oleh K.M. Sinaga disampaikan kepada Menteri Sosial sendiri turut membantu K.M. Sinaga dengan mengirim surat kepada Sekjen Kehakiman Abimanju pada tanggal 2 Mei 1967, Selanjutnya pada bulan yang sama tersusunlah nama-nama orang yang akan mendirikan perusahaan Asuransi Jiwa itu. Mereka adalah K.M. Sinaga S.H, Simatupang, Dra. Sarlim Sinaga, A.M. Sihobing dan Dr. H. Sinaga. Pertemuan resmi mereka yang pertama, 8 Juni 1967, merupakan kesempatan bulat untuk mendirikan

perusahaan Asuransi jiwa dengan nama BUMI ASIH JAYA, Nama Bumi diambil dari AJB-Bumi Putra 1912, Sedangkan Asih diambil dari kasih dan Jaya dari Jayakarta. Tempatnya pada tanggal 10 Juni 1967 mereka yang bertemu di Jl. Bajumas dan mengumpulkan modal sahamnya sebanyak Rp. 8.000.000.- dan uang ini distor ke bank of Sumatra dengan bunga sebesar 12% perbulan. Dan tanggal ini pulah yng ditetapkan sebagai hari lahirnya Bumi Asih Jaya.

Atas kerjasama yang baik ini, izin mendirikan perusahaan tersebut dikeluarkan pada bulan Agustus 1967. Langkah selanjutnya adalah memperkenalkan Bumi Asih Jaya kepada umum secara laus. Dengan mengirim undangan sebanyak 126 dalam tanggal 19 September 1967. Sebulan kemudian izin tersebut disetujui dan dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 1967. Demikiannlah Bumi Asih Jaya menjadi satu-satunya perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia yang pertama kali memprakarsi menjual polis berdasarkan mata uang US Dollar.

Selanjutnya membentuk formasi kerja untuk DKI Jakarta Raya yaitu :

- a. Judono bertugas di daerah Jakarta Selatan dan Pusat.
- b. Sutaryono bertugas di daerah Jakarta Utara.
- c. Tjipto Rahayu bertugas di daerah Jakarta Timur dan



Barat.

Kemudian pada 25 September 1967 K.M Sinaga dan istri berangkat menuju Medan untuk menjajaki dan mendirikan Cabang disana serta di Palembang. Pada suatu kesempatan diruangan kantor "ANTARA" Medan K.M. Sinaga mengadakan konferensi Pers, dimana ia menguraikan beberapa hal seperti :

1. Peranan Asuransi Jiwa dalam pembangunan Negara.
2. Menghapuskan kekhawatiran Pemegang Polisi terhadap inflasi.
3. Anjuran memperbanyak usaha Asuransi Jiwa.

Kerja keras dan ketekunan ternyata berhasil menembus rintangan dan kesukaran. Kondisi transisi dari orde baru pada saat itu rupanya mengalami suatu tingkat yang cukup menegahkan, terutama bagi kalangan perbankan. Namun dalam kondisi ini yang spekulatif ini, dua diantara Bank Swasta mengalami out of clearing dari Bank Sentral Indonesia, yaitu Bank Of Sumatra dan Bank Pembangunan.

Oleh karena Bumi Asih Jaya adalah salah satu naskah dari ke dua Bank tersebut, maka akibatnya uang Bumi Asih Jaya otomatis beku di kedua bank tersebut, hilanglah sudah. Pahit sekali kenyataan ini, satu persatu karyawannya meninggalkan Kantor dan K.M. Sinaga sendiri kembali ke LPS. Rupanya Tuhan tetap menyalurkan berkatnya kepada Bumi Asih Jaya lewat

Tahun demi tahun perkembangan Bumi Asih Jaya Pun, semakin baik dan hubungan dengan perusahaan sejenis serta asuransi baik ada di alam Negeri maupun luar negeri bertambah luas. Perkembangan dalam bidang investasi mulai 1973 tampak ada kemajuan, terutama dengan lahirnya anak-anak perusahaan hingga kini sudah banyak. Dengan adanya kerjasama yang baik antara karyawan dengan perjuangan yang tidak mengenal menyerah satu demi satu dibukalah Kantor Cabang, Distrik, Sektor diberbagai daerah dipersada Nusantara tercinta ini, yang pada saat ini tercatat 12 kantor Cabang, 110 Kantor Pemasaran Distrik dan 50 Kantor Sektor.

B. Struktur Organisasi

Sebelum dikemukakan lebih lanjut tentang strukturnya, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan tentang pengertian struktur organisasi.

Menurut The Liang Gie pengertian tentang Struktur organisasi adalah:

"Menurut yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi tersebut, serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap pekerjaan itu."

Dengan adanya pengertian tersebut di atas nampak struktur organisasi itu dimaksudkan untuk memperjelas

Adapun tata kerja kerja dari pada unsur-unsur organisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam struktur organisasi dalam perusahaan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. KPC yaitu Kepala Perusahaan Cabang mempunyai fungsi sebagai Top Manajemen di tingkat Cabang yang bertanggung jawab pada direksi Kantor Pusat dalam hal :
 - a. Pengembangan perusahaan,
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia,
 - c. Mengawasi kegiatan seluruh aktivitas pemasaran distrik yang ada di bawahnya.
2. WPC yaitu Wakil Pemimpin Cabang yang mempunyai fungsi membantu pimpinan cabang dalam hal :
 - a. Pembina dan pengawasan karyawan dicabang indotif.
 - b. Meningkatkan produksi penjualan produk Asuransi di wilayah Indonesia.
3. Untuk KTUC-yaitu, Kepala Tata Usaha Cabang bertugas sebagai pembantu pemimpin cabang dalam hal :
 - a. Pengelolaan Administrasi keuangan, pelayanan, Underwriting dan Akutansi.
 - b. Pengawasan dan pengendalian keuangan.
4. Kabag diklat berfungsi :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan
 - b. Bertanggung jawab di dalam usaha pengembangan

sumber daya manusia.

5. KPD yaitu Kepala Pemesaran Distrik, berfungsi sebagai Top Manajer di tingkat Distrik bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.

C. Dasar Hukum Tentang Pelaksanaan Asuransi

Betapa penting dan besar manfaatnya Asuransi di dalam Pembangunan dewasa ini, terutama dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi Asuransi yang didapat dari pemegang polis. Dalam alam modern ini sekarang kemungkinan orang memerlukan gerakan yang cepat, dimana apabila mungkin segala gerak manusia dijalankan dengan alat-alat yang modern. Alat-alat yang dipergunakan untuk keperluan tersebut disesuaikan ini dengan kemajuan teknologi. Sebagai akibat kemajuan ini, kemungkinan kecelekaan yang memakan jiwa manusia semakin besar, kecelekaan pada jalan raya, pada pabrik-pabrik dan pada pekerjaan pembangunan seringkali terjadi peranan Asuransi Jiwa untuk melindungi jiwa seseorang dari melapetaka yang mungkin timbul, yang belum diketahui sebelumnya dan tidak dikehendaki oleh setiap manusia, serta sekedar mengurangi beban bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Demi menjamin keamanan si bertanggung terutama apabila ada klaim hendaknya Pemerintah membuat peraturan hukum yang berupa undang-undang Asuransi,

terutama dalam Asuransi Jiwa agar terdapat keseragaman dari masing-masing perusahaan Asuransi Jiwa, sehingga dapat meyakinkan para peserta bahwa dirinya akan aman dan taerjamin haknya sesuatu yang menimpa pada dirinya.

Sebenarnya di dalam suatu perjanjian Asuransi, penanggung di samping menjalin resiko yang siftnya material juga menghadapi moral oleh karena kejujuran dari tertanggung harus dapat dipertarukannya atas dasar kepercayaan dari pihaknya saja walaupun mungkin ia bisa kena tipu. Adapun ketentuan yang menujuk harus adanya unsur kepnetingan pada asuransi itu didalam KUHD pasal 250 yang berbunyi : Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

Dari apa yang telah penulis cuplikan dari pendapat Prof. Emmy Pangarubuan Simanjuntak, SH pada kertas beliau yang berjudul "pengertian dan Ruang Lingkup Pertanggungan" yang beliau sampaikan pada waktu Simposium Hukum Asuransi di Universitas Andalas dengan bekerjasama LPHN, diselenggarakan tanggal 13 sampai 15 Nopember 1978, Menurut Prof. Wirjono

Prodjodikoro, SH mengatakan asuransi sebagai gejala hukum hampir sama dengan pendapat Prof. Emmy, ke dalam 5 (lima) sifat :

1. Sifat persetujuan
2. Sifat timbal balik (Wederkerig),
3. Sifat konsensual,
4. Sifat Perkumpulan dan,
5. Sifat perusahaan

Sifat-sifat Asuransi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Asuransi itu timbul berdasarkan suatu perjanjian
- b. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat (pelaksanaan perjanjian bergantung pada suatu yang tidakan tentu atau tidak pasti),
- c. Bahwa perjanjian itu bersifat timbal balik,
- d. Bahwa dengan mengalikan risiko itu ada kewajiban bertanggung membayar premi,
- f. Bahwa bertanggung akan menerima ganti rugi atau idemniteit sejumlah yang diderita dari penanggung. Kalau ada ganti rugi berarti bahwa bertanggung sungguh-sungguh menderita rugi dan ia akan memperoleh sejumlah yang dari penanggung sebagai pengganti dari kerugian yang ia derita.
- g. Bahwa di dalam perjanjian asuransi itu pada pihak bertanggung yang menerima ganti rugi harus melekat

sifat mempunyai kepentingan atas peristiwa yang tidak tertentu agar ia tidak menderita rugi.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan perasuransian, mengingat bahwa pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, dan kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3467).

BOSOWA



B A B IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah merupakan suatu proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh atasan langsung terhadap pekerjaan dan hasil kerja dari bawahannya, sehingga dapat tercegah terjadinya berbagai penyelewengan dan penyimpangan baik penyelewengan berupa penyalagunaan wewenang, maupun penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan berbagai kebijaksanaan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perkataan lain bahwa terhadap pekerjaan termasuk juga menyangkut prosesnya yang dapat menyentuh tidak sekedar pada ketetapan cara bekerja tetapi juga berkenang dengan berbagai aspek disiplin, ketekunan, dedikasi, loyalitas inisiatif dan kreaktivitas, dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

Dari uraian hasil analisa data yang menyangkut pengawasan melekat tersebut pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar di Kotamadya Ujung Pandang, maka dapat mengandung makna bahwa dalam melaksanakan pengawasan melekat, bilamana atasan langsung menemukan



berbagai hambatan di dalam melaksanakan pekerjaan yang bersumber dari kondisi di luar kewenangannya, maka hendaknya para bawahan segera dapat mengajukan usul atau usul guna perbaikan kepada pihak atasannya. Dengan cara tersebut maka diharapkan dapat dikurangi atau dihilangkan sehingga dapat terwujud efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada jenjang aparatur pemerintah yang terkait.

Dalam hal ini maka sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh pada saat melakukan penelitian pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Indonesia Timur di Kotamadya Ujung Pandang, yang mana kegiatan pengawasan melekatnya yang dilakukan oleh pimpinan pengawasan melekatnya yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Indonesia Timur di Kotamadya Ujung Pandang dilaksanakan dan berjalan secara kontinyu atau secara terus menerus dan berkesinambungan dengan perencanaan kegiatan yang terpadu dan terarah sesuai kondisi kerja yang dilakukan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Indonesia Timur di Kotamadya Ujung Pandang.

1. Sarana Pengawasan Melekat

Telah di jelaskan sebelumnya bahwa sarana pengawasan melekat adalah meliputi :

a. Struktur Organisasi yaitu,

Menyusun susunan organisasi dan atat laksana serta data kerja pimpinan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Indotim di Kotamadya Ujung Pandang yang merupakan suatu upaya tindak lanjut dari analisa jabatan dengan tetap memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 tahun 1978, maka usul penyempurnaan struktur organisasi pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Indonesia Timur di Kotamadya Ujung Pandang.

2. Manusia dan Budaya

Peningkatan manusia dan budaya bagi insan pengawasan adalah merupakan suatu hal yang sangat peka di dalam upaya mengantisipasinya, sehingga pada dewasa ini melalui pengawasan melekat diupayakan :

- a. Penyusunan program pendidikan dan latihan kepemimpinan, pengiriman karyawan pada kursus-kursus yang relevan dengan pengawasan melekat serta berbagai kursus dengan tujuan guna dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas kepemimpinan.
- b. Mengadakan forum komunikasi antara atasan dan bawahan serta instansi-instansi yang terkait sehingga dapat diciptakan hubungan kerja sama

antara atasan dan bawahan serta hubungan yang harmonis antara bawahan dan atasannya.

- c. Peningkatan tatalaksana yaitu dengan mengadakan dan melaksanakan forum komunikasi antara pihak pimpinan dengan bawahan agar setiap pejabat menjadi panutan bagi bawahan di dalam melaksanakan tugasnya dan atau kegiatan-kegiatannya dimana sebagai karyawan merupakan insan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya cabang Indonesia Timur di Kotamadya Ujung Pandang.

Setelah kita melihat sejauh mana pelaksanaan pengawasan melekat pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar di Kotamadya Ujung Pandang, yang dalam hal ini dikhususkan pada instansi tersebut, maka untuk mengadakan atau menjadi suatu bahan perbandingan sebagai tingkat pengevaluasian terhadap pengawasan melekat pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Indotim berikut ini diuraikan sekilas mengenai pedoman pelaksanaan pengawasan melekat pada PT. Asuaransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Indonesia Timur di Kotamadya Ujung Pandang.

Sesuai dengan instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 yang telah ditetapkan sebelumnya, maka ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan melekat, yang tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kelancaran dan

ketetapan dan pelaksanaannya dapat bedaya guna dan berhasil Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Indonesia Timur Ujung Pandang maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Tahun 1980 dan No. 3 tahun 1983 serta berbagai instruksi yang dilakukan untuk mengambil kebijaksanaan dalam pelaksanaan pengawasan melekat.
- b. Dengan memperhatikan kerangka kebijaksanaan Wakil Presiden Republik Indonesia, mengenai pengawasan atas pelaksanaan Pancakrida Pembangunan IV yang disampaikan pada Rapat Koordinator dan pengawasan serta Kerja sama.
- c. Kebijaksanaan Wakil Presiden Republik Indonesia tentang pelaksanaan pengawasan Tahun 1985/1986 yang merupakan penyempurnaan dari petunjuk-petunjuk Wakil Peresiden yang telah dikemukakan pada rapat koordinasi yang lalu.

Dari beberapa kebijaksanaan dan keputusan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat ditetapkan :

- a. Pedoman pelaksanaan pengawasan melekat dilingkungan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Indotim
- b. Setiap pimpinan unit organisasi/satuan kerja melakukan pengawasan melekat agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Setiap pimpinan staf teknik/administrasi di lingkungan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar di Kotamadya Ujung Pandang melakukan pengawasan staf menurut fungsi dan ruang lingkup masing-masing.

Setelah mendapat informasi dat pelaksanaan pengawasan melekat pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Indotim yang diperoleh melalui sampel responden penelitian, maka berikut ini akan dilihat sampai sejauh mana pengaruh pengawasan melekat terhadap upaya peningkatan pegawai/karyawan dalam menjalankan tugasnya.

Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan pengawasan melekat yang digunakan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Indotim dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 1

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN
MELEKAT YANG DIGUNAKAN PADA PT. ASURANSI JIWA
BUMI ASIH JAYA CABANG MAKSSAR

No.:	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat berpengaruh	7	18,42
2.	Berpengaruh	11	28,95
3.	Cukup Berpengaruh	15	39,40
4.	Kurang berpengaruh	5	13,15
5.	Tidak berpengaruh	-	-
Jumlah		35	100,00 %

Sumber Data : Hasil Wawancara penulis, tahun 1994

Dari data pada tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan melekat yang digunakan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Makassar, telah mendapat jawaban dari responden yang cukup, dimana responden mengatakan cukup berpengaruh ada 15 orang responden atau 39,49 %, selanjutnya yang mengatakan berpengaruh ada 11 orang responden atau 28,95 %, yang mengatakan sangat berpengaruh ada 7 orang responden atau 18,42%, serta yang mengatakan kurang berpengaruh ada 5 orang tidak berpengaruh.

Selanjutnya perusahaan Asuransi harus menyelenggarakan :

- a. Pengembangan sumber daya manusia yang dapat menunjang pengelolaan perusahaan secara profesional, pengembangan perusahaan secara sehat, adanya kemampuan dalam mengetahui perkembangan teknologi serta penyelenggaraan jasa asuransi secara tertib dan bertanggung jawab.
- b. Administrasi keuangan yang dapat menunjang ketertiban pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan.
- c. Pengelolaan data yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengelolaan risiko, pemesanan penyelesaian klaim dana pelayanan kepada pemegang polis, serta memungkinkan tersedianya data yang relevan, akurat, dan tepat waktu, untuk pemeriksaan dan pengawasan perusahaan maupun untuk analisa dalam rangka pengembangan perusahaan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar.

B. Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Dalam pendayagunaan dan pembudayaan pengawasan melekat adalah sarana pengawasan melekat yang sekaligus merupakan sistem pengawasan melekat yang dilakukan guna pemanfaatan fungsi daripada pengawasan melekat itu sendiri. Dapat diketahui bahwa pengawasan melekat yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar adalah merupakan salah satu fungsi.

manajemen pemerintah yang menilai apakah pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkannya dan dilaksanakan secara berdaya guna serta dapat mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendayagunaan pengawasan melekat pada hakekatnya merupakan suatu ketergantungan pada sarana pengawasan melekat sebagai alat untuk dapat mengukur sampai sejauh mana program, kegiatan tersebut telah dilaksanakan fungsi pengawasan melekat ini merupakan unsur yang statis, oleh sebab itu harus diperasionalkan oleh pimpinan atau atasan langsung melalui :

- a. Penggarisan struktur organisasi yang jelas,
- b. Perincian kebijaksanaan pelaksanaan secara tertulis,
- c. Suatu rencana kerja yang menggambarkan suatu kegiatan,
- d. Pencatatan hasil kerja dan pelaporan
- e. Wadah pembinaan personal yang dilakukan secara kontinue

Dari penciptaan sarana pengawasan melekat yang lebih efektif, maka perlu dilakukan suatu pengujianm terhadap tingkat keberhasilan dari unsur-unsru sarana pengawasan melekat ini merupakan tiang pokok kegiatan, sehingga sangat perlu diadakan pengidentifikasian sedini mungkin guan mencegah kelesuhan yang terjadi

dimana hal tersebut harus dilaksanakan secara terus menerus dan terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis mengadakan suatu penelitian ilmiah pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar diperoleh data terhadap unsur-unsur sarana sebagai fungsi pengawasan melekat adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Salah satu pendapat yang mengatakan bahwa perencanaan atau melaksanakan suatu pekerjaan relatif lebih muda daripada mengawasinya. Seperti halnya dalam lingkungan yang masih banyak memiliki nilai-nilai tradisi, kondisi sosial ekonomi yang lemah. Pengawasan melekat sebagai salah satu fungsi manajemen dan sebagai "managerial work" yang harus mendapat suatu penanganan oleh setiap pimpinan kebersihan organisasi atau unit kerja.

Suatu organisasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena struktur organisasi tersebut adalah merupakan satu pola dari penanganan beberapa fungsi yaitu bagaimana satu pengaturan hubungan kerja di dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pengaruh struktur dalam menjalankan suatu aktivitas organisasi yang bersangkutan adalah sangat penting di dalam upaya

untuk mengadakan pendelegasian wewenang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki serta berdasarkan pembagian tugas oleh atasan atau pimpinan. Seperti halnya dialami oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam pembagian tugas-tugas sesuai dengan bagian, sub bagian masing-masing, namun apakah pembagian tugas tersebut telah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam upaya pencapaian hasil yang lebih baik, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan bawahan menerima tugas dari pihak atasan atau apakah pembagian tugas tersebut jelas diterima dan dipahami oleh bawahan sebagai pelaksana tugas operasionalnya.

Pengawasan melekat dapat dilaksanakan dengan baik apabila pada setiap satuan organisasi atau satuan kerja dalam struktur organisasi telah tergambar dengan jelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, kedudukan personil unit-unit kerja serta hubungan diantara satuan-satuan tersebut.

Jelasnya suatu pembagian tugas kepada bawahan yang harus dijalankan atau dilaksanakan, sudah tentu telah memperhatikan berbagai kriteria penempatan personil, maka dapat dicegah timbulnya kesimpang siuran, duplikasi pekerjaan atau



terjadinya kekosongan pelaksanaan tugas. Karean apabila bawahan dapat menerima ini sebagai tanggung jawabnya di landasi dengan bidang tugas yang jelas dari pihak atasa, maka akan tercapai suatu keberhasilan di dalam menjalankan aktivitas, kegiatan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka berikut ini adalah merupakan pengakuan/ tanggapan responden serta jawaban dari responden tentang kejelasan pembagian tugas untuk masing-masing pegawai untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEJELASAN PEMBAGIAN
TUGAS DARI MASING-MASING PEGAWAI PADA PT.
ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA MAKASSAR

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Jelas Sekali	12	31,57
2.	J e l a s	18	47,36
3.	Cukup	8	21,05
4.	Kurang jelas	-	-
5.	Tidak jelas	-	-
	J u m l a h	38	100,00

Sumber Data : Hasil Wawancara Penulis, Tahun 1994.

Dari data tersebut pada tabel di atas menunjukkan bahwa kejelasan terhadap pembagian tugas dari masing-masing pegawai pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar, telah mendapat tanggapan dari responden adalah baik. Dimana responden mengatakan bahwa pembagian tugas itu adalah jelas ekali yaitu ada 12 orang responden atau 31,57 %, selanjutnya responden yang mengatakan jelas ada 18 orang responden atau 47,36 %, serta responden yang mengatakan cukup jelas ada 8 orang responden atau 21,05 % dan tidak ada responden yang mengatakan kurang jelas dan tidak jelas terhadap kejelasan pembagian tugas masing-masing pegawai/karyawan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai/karyawan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar telah paham dan mengerti akan secara jelas sekali tentang masing-masing pembagian tugas kepada pegawai/karyawan.

hal demikian akan mempunyai dampak yang sangat positif bagi peningkatan disiplin kerja dan pada akhirnya dapat mampu menciptakan unsur pegawai/karyawan yang berdaya guan dan berhsil guna sehingga dapat menghindari terjadinya penyelewenang

dan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab serta akan tercipta kondisi kerja yang dapat menunjang keberhasilan unsur aparatur yang bersih dan berwibawa.

2. Perincian Kebijakanaksanaan

Setelah diketahui akan pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah diuraikan secara jelas pada struktur organisasi, maka langkah berikutnya adalah perincian mengenai kebijakanaksanaan yang hendaknya dilakukan secara tertulis dan terprogram agar dapat menjamin kelancaran dair kegiatan bagian atau unit kerjanya dalam suatu kurun waktu tertentu. Kebijakanaksanaan yang ditempuh oleh atasan atau pimpinan kepada bawahan sebagai pelaksanaan kebijakanaksanaan adalah merupakan hal yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Perincian kebijakanaksanaan merupakan suatu pedoman kerjayang dituangkan atau diturunkan dari atasan kepada bawahan sebagai pelimpahan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, karena itu diperlukan perincian kebijakanaksanaan secara tertulis sehingga hal tersebut dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Namun kita sadari bahwa seorang pegawai/karyawan atau bawahan adalah mahluk biasa yang dalam melaksanakan aktivitasnya sering kurang memuaskan pihak lain

atau mengalami kegagalan. Untuk itu hal tersebut sedini mungkin perlu di atasi agar tdaik terjadi penyalahgunaan, penyelewengan yang dapat merugikan.

Salah satu yang dapat mempengaruhinya adalah apakah perincian kebijaksanaan yang diberikan tersebut oleh atasan atau pimpinan kepada bawahan atau yang bersnagkutan dapat akan dapat diterima dengan baik, atau dengan kata lain instruksi yang diturunkan itu apkah cukup jelas diterima atau kurang jelas bahkan sama sekali tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan hasil penelitian penulis pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar sebagai obyek penelitian adalah nampak pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEJELASAN PERINCIAN
KEBIJAKSANAAN PADA PT. ASURANSI JIWA BUMI
ASIH JAYA MAKASSAR

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Jelas Sekali	10	26,31
2.	J e l a s	20	52,63
3.	Cukup	8	21,05
4.	Kurang jelas	-	-
5.	Tidak jelas	-	-
J u m l a h		38	100,00

Sumber Data : Hasil Wawancara Penulis, Tahun 1994.

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kejelasan perincian kebijaksanaan dari atas kepada bawahan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar yaitu dimana sebagian responden mengatakan jelas sekali yaitu 10 orang responden atau 26,31 %, selanjutnya yang mengatakan jelas ada 20 orang responden atau 52,63 %, serta responden yang mengatakan cukup jelas ada 8 orang responden atau 21,05 %, dan yang mengatakan kurang jelas dan tidak jelas tidak ada responden yang memberikan jawaban.

Dengan kondisi yang demikian, maka oleh pihak pemerintah dalam hal ini pimpinan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar selalu mengambil kebijaksanaan dan menurunkan kepada kepala bagian kemudian dilanjutkan kepada bawahan pada masing-masing bagian disertai dengan kebijaksanaan tentang teknis pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini merupakan suatu upaya oleh pimpinan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar ini agar menciptakan suasana dan kondisi kerja yang lebih harmonis sehingga dapat terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan.

3. Rencana Kerja

Perencanaan kerja adalah merupakan suatu rencana yang dapat menggambarkan berbagai kegiatan

yang harus dilaksanakan serta bagaimana bentuk hubungan antara kegiatan tersebut beserta sasaran yang hendak di capai dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Berbicara mengenai pengawasan melekat, maka rencana kerja adalah merupakan salah satu fungsi dari pengawasan melekat dan sekaligus dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan yang dicapai yaitu apakah keberhasilan tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan direncanakan suatu kegiatan. Sebab berbicara mengenai pengawasan melekat, maka rencana kerja adalah merupakan salah satu fungsi dari pengawasan melekat dan sekaligus dapat di jadikan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan yang dicapai yaitu apakah keberhasilan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya ataukah perlu diperbaiki guna menyempurnakan lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka berikut ini adalah merupakan tanggapan dari responden tentang ketepatan pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KETEPATAN PELAKSANAAN
TUGAS DENGAN RENCANA KERJA YANG DIRENCANAKAN
PADA PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA
M A K A S S A R

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tepat Sekali	11	28,94
2.	T e p a t	24	63,15
3.	Cukup Tepat	3	7,89
4.	Kurang Tepat	-	-
5.	Tidak Tepat	-	-
; J u m l a h		38	100,00

Sumber Data : Hasil Wawancara Penulis, Tahun 1994.

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa ketetapan pelaksanaan tugas dengan rencana kerja yang direncanakan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar adalah baik. Ini terbukti dengan adanya tanggapan responden yang mengatakan tepat sekali yaitu ada 11 orang responden atau 28,94 %, selanjutnya yang mengatakan tepat ada 24 orang respondne atau 63,15 %, serta yang mengatakan cukup tepat ada 3 orang responden atau 7,89 %, dan tidak ada responden yang memberikan penilaiannya yang mengatakan kurang

tepat dan tidak tepat.

Dari data atau informasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya rencana kerja yang di tetapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar dapat berjalan dengan perencanaannya dan dapat memperoleh hasil yang dapat memuaskan. Keberhasilan ini dapat diukur dengan adanya tanggapan dari responden yang menyatakan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai/karyawan tersebut tepat dengan perencanaannya. Hal ini disebabkan karena semua kegiatan tersusun secara teratur dalam jadwal kegiatan (work plan) dan penyusunan waktu yang tepat (time schedule) sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan pihak pimpinan sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan melekat agar lebih mendisiplinkan pegawainya dalam melaksanakan tugas yang telah di percayakan kepadanya dan diembangnya itu.

4. Prosedur Kerja

Setelah kita menyusun rencana kerja yang merupakan gambaran pelaksanaan tugas, maka berikut ini akan diuraikan secara global prosedur kerja yang baik, yang mampu dan merupakan petunjuk pelaksanaan dari atasan kepada bawahan, atau merupakan metode dan tata kerja yang telah

direncanakan atau ditetapkan sehingag dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna atau berjalan secara efesien dan efektivitas.

Dalam hal ini, maka oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar telah menyusun prosedur kerjanya secara lebih mapan, khususnya pada peningkatan bidang pelayanan (public Service) dengan tetap memperhatikan Job Deskription bagi para pemegang jabatan, baik secara struktural maupun secara non struktural serta selalu berdasarkan atas ketentuan-ketentuan pemerintah yang berlaku maoun sistem perundang-undangan yang berlaku secara keseluruhan.

Guna terciptanya kondisi kerja yang baik dan hamornis antara atasan dan bawahan, maka berdasarkan tanggapan responden dari responden pada obyek penelitian mengenai kejelasan prosedur kerja pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 5
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEJELASAN PROSEDUR
KERJA PADA PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH
JAYA MAKASSAR

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Jelas Sekali	18	47,36
2.	J e l a s	12	31,57
3.	Cukup	8	21,05
4.	Kurang jelas	-	-
5.	Tidak jelas	-	-
Jumlah		38	100,00

Sumber Data : Hasil Wawancara Penulis, Tahun 1994.

Dari data pada tabel tersebut di atas jelas terlihat bahwa kejelasan prosedur kerja pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar adalah baik sekali. Ini dapat dibuktikan dengan adanya responden yang mengatakan jelas sekali yaitu ada 18 orang responden atau 47,36 %, selanjutnya responden yang mengatakan jelas ada 12 orang responden atau 31,57 %, serta yang mengatakan cukup jelas ada 9 orang responden atau 21,05 %, dan tidak ada responden yang memberikan penilaiannya mengatakan kurang jelas dan tidak jelas kejelasan prosedur kerja pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya



Makassar.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa secara umum dapat dilihat bahwa prosedur kerja yang diberikan dari pihak atasan kepada bawahan sebagai petunjuk pelaksanaan dapat diterima dengan jelas sekali, hal ini terbukti dengan adanya 18 orang responden menanggapi jelas sekali terhadap prosedur kerja tersebut.

Hal ini bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan akan terlaksananya karena bawahan dapat mengerti prosedur kerja dan tata cara pelaksanaan serta bagaimana pelaksanaannya, sehingga dengan sendirinya akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dari bawahan tersebut.

5. Pencatatan Hasil Kerja dan Sistem Pelaporan

Penatatan hasil kerja dan pelaporan adalah merupakan alat bagi pihak ayasan atau pimpinan untuk mendapatkan informasi yang dapat diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik menyangkut pelaksanaan tuags maupun pengelolaan keuangan. Pencatatan yang baik dan benar sesuai dengan hasil sebenarnya adlah sangat bermanfaat, karena apabila dair hasil pencatatan tersebut terbukti terdapat rencana kerja

yang tidak dapat dilaksanakan untuk kurun waktu atau periode tertentu, maka hal tersebut pimpinan dalam rangka pengambilan kebijaksanaan dan keputusan untuk periode yang akan datang dengan memprioritaskan pada rencana kerja tidak dapat dilaksanakan pada periode yang lalu.

Bagi pimpinan atau atasan dalam melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan juga dapat menggunakan laporan hasil atau pencatatan hasil yang telah dibuat oleh bawahan secara terperinci, serta dapat berupa informasi dari hasil pengawasan fungsional dan informasi yang berasal dari pengawasan masyarakat di dalam upaya melakukan perbaikan, imbingan dan penyempurnaannya di lingkungan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar dalam upaya untuk melakukan dan menjalankan mekanisme pencatatan hasil dan pelaporan kegiatan guna melakukan pemantauan pengawasan melekat oleh pimpinan bersangkutan diharuskan membuat laporan tahunan (Januari sampai dengan Desember) mengenai program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat.

Semua hasil pelaporan itu bersumber dari pencatatan hasil kegiatan yang dilaporkan secara

rutin dan kontinue atau terus menerus oleh bawahan kepada atasan pejabat yang berwenang.

Untuk dapat mengukur lancar atau tidaknya pelaksanaan pencatatan hasil dan pelaporan yang dilakukan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar, melalui hasil penelitian yang penulis peroleh/lakukan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

TABEL 6

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KELANCARAN PENCATATAN
HASIL KERJA DAN PELAPORAN PADA PT. ASURANSI
JIWA BUMI ASIH JAYA MAKASSAR

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat lancar	7	18,42
2.	L a n c a r	23	60,52
3.	Cukup Lancar	6	15,78
4.	Kurang Lancar	2	5,26
5.	Tidak Lancar	-	-
J u m l a h		38	100,00

Sumber Data : Hasil Wawancara Penulis, Tahun 1994.

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan kelancaran pencatatan hasil kerja dan pelaporan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar adalah baik. Ini dapat dibuktikan dengan

adanya responden yang memberikan tanggapannya mengatakan yaitu sejumlah 7 orang responden atau 18,42 %, selanjutnya yang mengatakan lancar ada 23 orang responden atau 60,52 %, serta yang mengatakan cukup lancar ada 6 orang responden atau 15,78 %, yang mengatakan kurang lancar ada 2 orang responden atau 5,26 %, dan yang mengatakan tidak lancar tidak ada.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proses pencatatan hasil dan sistem pelaporan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar telah mencapai prosentase 60,52 % yang mengatakan lancar, baik di dalam kegiatannya maupun di dalam pelaksanaan adminsitrasinya.

6. Pembinaan Personil

Pembinaan personil adalah merupakan salah satu tugas yang sangat penting dari seorang pimpinan atau pihak atasan serta sangat meenntukan berhasilnya suatu pekerjaan itu dilaksanakan atau dikerjakan, pembinaan bagi perosnil adalah merupakan upaya yang dilakukan guna menjadikan para pelaksana sebagai unsur dan sarana yang mampu melaksanakan dan menunjang pelaksanaan tugas dnegan baik serta dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi bawahan tersebut sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan maksud

dan tujuan organisasi serta demi kepentingan tugasnya.

Pembinaan terhadap personil PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar adalah sangat penting dan bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dedikasi dan disiplin para pegawai/karyawan, sehingga dapat mampu menciptakan aparat yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diembannya. Untuk kepentingan itulah maka diperlukan adanya upaya pembinaan personil secara terus menerus dan berkesinambungan agar dapat mampu melahirkan personil yang berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk lebih jelasnya tentang kelancaran pelaksanaan pembinaan personil pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 7

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KELANCARAN PEMBINAAN
PERSONIL PEGAWAI PADA PT. ASURANSI JIWA BUMI
ASIH JAYA MAKASSAR

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat lancar	8	21,05
2.	L a n c a r	12	31,57
3.	Cukup Lancar	14	36,84
4.	Kurang Lancar	4	10,52
5.	Tidak Lancar	-	-
J u m l a h		38	100,00

Sumber Data : Hasil Wawancara Penulis, Tahun 1994.

Dari data pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa pembinaan perosnil pegawai pda PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar adalah cukup lancar. Dapat dibuktikan dengan adanya responden yang mengatakan sangat lancar ada 8 orang responden atau 21,05 %, selanjutnya yang mengatakan lancar ada 12 orang responden atau 31,57 % yang mengatakan cukup lancar ada 14 orang responden atau 36,84 %, serta responden yang mengatakan kurang lancar ada 4 orang responden atau 10,52 %, dan tidak ada responden yang mengatakan tidak lancar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa proses pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar berjalannya dengan cukup lancar, ini terbukti dengan adanya tanggapan yang positif.

Selanjutnya fungsi pengawasan melekat pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar adalah dengan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan, yang dilakukan terhadap setiap satuan kerja di lingkungan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar.
- b. Pengujian dan penilaian, dilakukan terhadap hasil yang dilaporkan secara berkala dari setiap satuan kerja.
- c. Pengurusan yang dilakukan untuk meneliti mengenai kebenaran laporan atau pengaduan mengenai hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang teknik operasional dan teknik administrasi yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar.
- d. Peninjauan dilakukan dengan jalan menyaksikan langsung ke tempat yang bersangkutan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan program.

- e. Pengamatan dan pemantauan dilakukan dengan menyaksikan langsung ke tempat untuk menampung masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan program berdasarkan laporan dan informasi.
- f. Kunjungan staf, dimana dilakukan dengan menandatangani secara langsung ke tempat oleh anggota staf teknik/administrasi untuk mendapatkan informasi dan data mengenai kebijaksanaan pelaksanaan suatu kegiatan atau ketentuan atasan, dan bilamana perlu memberikan petunjuk bagaimana cara pelaksanaan selanjutnya itu yang merupakan tindak lanjut.
- g. Pembinaan dilakukan oleh pimpinan terhadap aparatur bawahan supaya dapat berbut dan melakukan tugasnya sesuai dengan petunjuk, pedoman dan kebijaksanaan yang telah diberikan.
- h. Pengendalian yang dilakuakn terhadap apoaratur bawahan supaya tidak menyipang dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Penerbitan yang dilakukan dengan tindakan administrasi atau tindakan lainnya sesuai dengan kewenangan.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Melekat

1. Faktor Pendukung

Pegawai/karyawan adalah merupakan aparatur negara, abdi masyarakat, abdi negara untuk itu maka dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas atau tugas pengabdianya perlu selalu di tanamkan disiplin yang tinggi, dalam pengertian bahwa mematuhi dan mentaati dengan penuh kesadaran terhadap semua peraturan eprundang-udangan yang berlaku, yang dapat mengatur dan mengikat di dalam organisasi yang diembannya. Dengan demikian peranan pengawasan melekat sebagai salah satu fungsi manajemen sangat penting artinya bagi atau dalam organisasi dalam rangka pelaksanaan pengawsan melekat pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar.

Pengawasan melekat adalah merupakan program guan memacu pendayagunaan apaartur negara, perklu penjabaran yang lebih lanjut dalam membentuk aparatur pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas berbudi luhur, taat dan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pada gilirannya akan bermuara pada pembentukan citra pegawai/karyawan yang bauk serta

mempunyai etos kerja yang lebih tinggi, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dipercayakan dari pihak atasan kepadanya, bersih dan berwibawah, terutama dapat menjadi contoh dan teladan ditengah-tengah masyarakat.

Dengan landasan disiplin tersebut maka pegawai/karyawan yang bersangkutan dapat mempengaruhi maju dan berkembangnya suatu organisasi, baik yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern.

Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988, tentang Penataran Pengawasan Melekat bagi pejabat Republik Indonesia, sebagai wujud pelaksanaannya maka para pejabat Eselon III dan IV serta pejabat BUMN dan BUMD keseluruhannya telah mengikuti penataran pengawasan melekat termasuk di dalamnya pejabat Eselon III, IV, dan IV/a. Hal ini sangat menunjang dalam membentuk pegawai/karyawan yang bersih dan beriwibawa.

Tolok ukur dari kebersihan pengawasan melekat adalah terbukti dengan makin berkurangnya pelanggaran selama ini yang dibuat terhadap disiplin dari peraturan pegawai (PP No. 30 Tahun 1980, PP No. 32 tahun 1979 serta peraturan pelaksanaannya) dan makin kokohnya persatuan dan kesatuan



pegawai Republik Indonesia.

Di lain pihak yang bertitik tolak daripada kegiatan organisasi tersebut yang berupa program kerja, hasil yang telah di capai sertasi indikator keberhasilannya, maka dari hasil kegiatan melekat akan menjadi bahan masukan bagi pimpinan sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah guna menyesuaikan kemabali kegiatan pelaksanaannya dengan rencana kerja yang telah diprogramkannya serta kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku, untuk itu maka yang menjadi faktor pendukung bagi keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan melekat adalah tingkat kadar kesadaran disiplin aparatur pemerintah yang mengembang tugas-tugas tersebut dapat berperan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Selain dari faktor pendukung tersebut dalam melaksanakan pengawasan melekat adalah para pimpinan dapat memberikan pengaruh serta motivasi terhadap bawahannya melalui pendekatan persuasif, rasa kebersamaan, rasa memiliki serta rasa tanggung jawab, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan bimbingan secara teratur dan terus menerus terhadap bawahan sebagai pelaksana tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan hasil penelitian penilaian pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar, maka nampak bahwa langkah-langkah tersebut terlihat adanya pelaksanaan pengawasan melekat secara baik, namun belum sepenuhnya dapat dikatakan bahwa telah sempurna sebagaimana yang telah diharapkan.

Para pejabat atau pimpinan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar, senantiasa melakukan pemantauan terhadap bawahan dan staf di bawahnya melalui laporan program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat, serta tindak lanjutnya terutama pimpinan sebagai penanggung jawab secara keseluruhan terhadap pembinaan kepegawaian. Dengan hasil pemantauan tersebut dapat merupakan faktor utama dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan melekat.

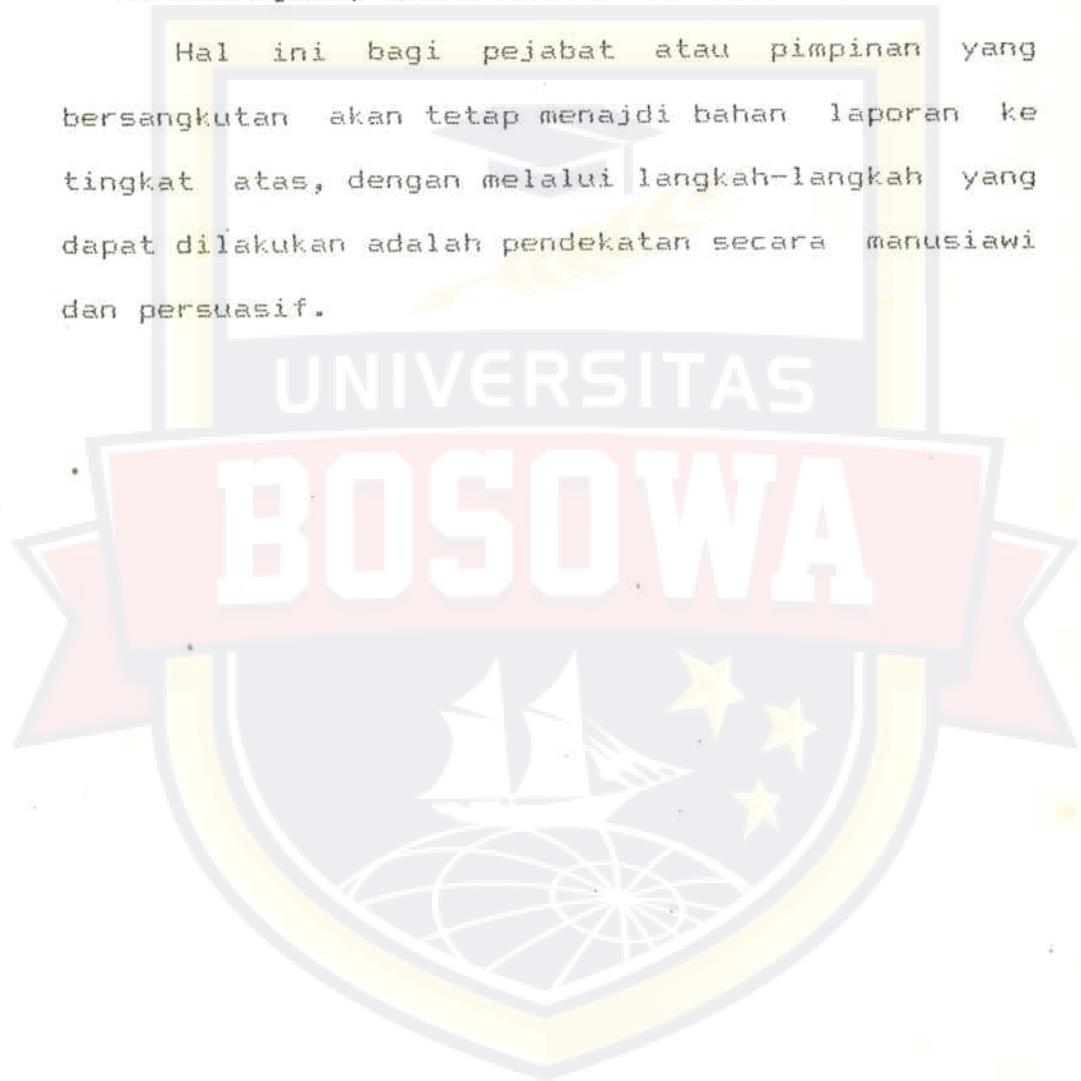
2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan melekat adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat pemahaman karyawan terhadap waskat masih sangat kurang
- b. Sebagai pegawai/karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya kurang menghayati dengan baik mengenai tuags pokok-pokok dan fungsi yang diembannya.

c. Serta masih ada rasa enggan atasan untuk bertindak terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin mengingat adanya rasa kekeluargaan, teman sejati dan lain-lain.

Hal ini bagi pejabat atau pimpinan yang bersangkutan akan tetap menjadi bahan laporan ke tingkat atas, dengan melalui langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah pendekatan secara manusiawi dan persuasif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan melekat adalah merupakan suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pekerjaan dan hasil pekerjaan yang telah di laksanakan oleh bawahan, dengan harapan dapat tercegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah di tetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan melekat yang digunakan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya cabang Makassar di Kotamadya Ujung Pandang cukup berpengaruh yaitu dari 38 orang responden yang terpilih ada 15 orang responden atau 39,48 % yang memberikan jawaban yang cukup. Dan bilamana atasan langsung menemukan berbagai hambatan di dalam melaksanakan pekerjaan yang bersumber dari kondisi di luar kewenangannya, maka pihak bawahan dapat mengajukan perbaikan kepada atasan untuk diperbaiki.
2. Dengan adanya fungsi pengawasan melekat dalam rangka proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, maka akan menjadi bahan masukan kepada atasan dalam mengambil keputusan serta tindak lanjut. Dari hasil

penelitian dengan pendekatan melalui sarana pengawasan melekat pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar sejak dari saat pelaksanaannya hingga pada saat ini telah mencatatkan hasil yang cukup baik, hal tersebut terbukti dengan adanya jawaban responden sangat positif dari 38 orang responden yang di wawancarai, yang mana telah mengetahui, mengerti dan memahamai secara baik tentang fungsi pengawasan di dalam pembentukan pribadi pegawai-pegawai/karyawan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar, ini dengan menjunjung tinggi disiplin pegawai yang sangat menunjang dalam pengawasan.

3. Melalui sistem pengawasan melekat, maka faktor yang mempengaruhi adalah :

a. Faktor Pendukung

Dalam melaksanakan pengawasan melekat adalah para pimpinan dapat memberikan pengaruh serta motivasi terhadap bawahannya melalui pendekatan persuasif, rasa kebersamaan, rasa memiliki serta rasa tanggung jawab, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan bimbingan secara teratur dan terus menerus terhadap bawahan sebagai pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya:

b. Faktor Penghambat adalah :

- Tingkat pemahamana pengawasan melekat masih kurang
- Pegawai dalam menjalankan tugasnya masih kurang menghayati
- Pimpinan masih mempunyai rasa enggan untuk bertindak terhadap bawahan.

B. Saran-saran

1. Dewasa ini diupayakan suatu tata kerja yang berdaya guan dan berhasil guna, maka disarankan adanya suatu proses pemantauan pemeriksaan dan evaluais terhadap hasil kerja bawahan, dilakukan secara berencana dan berkala agar mampu membentuk pimpinan yang bersih dan berwibawah, jujur dan setia dalam menunjang pelaksanaan tugas yang diembannya.
2. Untuk menciptakan unsur pimpinan yang berdedikasi tinggi mempunyai sifat loyalitas serta berdisiplin yang tinggi, maka disarankan supaya perlu diuyapkan etrus dilakukan pemantapan melalui proses pelatihan, kursus, dan pelatihan penataran kepada peagwai/karyawan secara terus menerus, karean lewat kegiatan tersebut dapat membina personil-personil yang berada pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Makassar

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amirin, M. Tatang, Drs., 1989, Fokok-pokok teori Sistem, Jakarta: Bina Aksara
- Handyaningrat, Soewaro., 1988. Pengantar Studi Ilmu Adminsitrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta.
- Manullang, 1981. Manajemen Personalialia, Ghalia Indonesia.
- Moenir, A.S. 1981. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Jakarta : Gunung Agung,
- Nawawi, Hadri, H. 1989. Pengawasan Melekat di Lingkungan Apaartur pemerintah, Jakarta : Erlangga
- Sarwoto, 1981. Dasar-dasar Organisasi Manajemen, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Siagian, S.P. 1980. Filsafat Administrasi, Jakarta : Gunung Agung.
- _____, 1988. Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan, Jakarta : CV. Haji Masagung.
- _____, 1983. Manajemen Suatu Pengantar, Jakarta: Gunung Agung.
- Sujatmiko, Ir. 1989. Norman dan Etika Pengawasan, Sinat Grafika.
- _____, 1983. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Winardi, 1986, Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem, Alumni Bandung.

B. Buku Metode Penelitian

- Amirin, M., Tatang, Drs., 1986. Menyusun Rencana Penelitian, Universitas Gaja Mada.

Faisal, Sanafiah, 1989. Format-format Penelitian Sosial, Jakarta CV. Jawali.

Sugiyono, DR., 1983. Metode Penelitian Administrasi Lafabeta Bandung.

Suryabrata, Sumadi, BA., Drs. Ed.S., Ph.D., 1983, Metodologi Penelitian, Universitas Gaja Mada.

C. Dokumen-Dokumen

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1983. Tentang Pedoman Pengawasan

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988, Tentang Penataran Pengawasan Melekat bagi Pejabat Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1989. Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NO. II/MPR/1988, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.